

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan kas yang dikelola oleh instansi tersebut berasal dari dua aspek utama. Pertama, penerimaan kas yang berasal dari penyewaan rumah dinas yang disediakan sebagai fasilitas tempat tinggal bagi pegawai yang telah berkeluarga, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai serta menunjang kinerja dan kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan. Kedua, penerimaan kas yang diperoleh dari penyewaan aula milik dinas, yang digunakan untuk kegiatan pelatihan, seminar, ataupun pertemuan resmi baik oleh internal dinas maupun pihak eksternal.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan sistem pengendalian internal yang mencakup lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Penerapan sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi penerimaan kas dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, diharapkan dapat tercipta tata Kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel,

sehingga mendukung keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan instansi secara optimal.

Adapun sumber penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berasal dari beberapa kegiatan, diantaranya yaitu:

1. Penerimaan dari sewa rumah Dinas

Bagian yang terlibat dalam penerimaan kas dari sewa rumah Dinas yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Beendahara penerimaan
- c. Bendahara pengeluaran
- d. Pegawai yang menyewa rumah Dinas

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penerimaan sewa rumah Dinas yaitu:

- a. Buku Kas Umum (BKU) terkait penerimaan kas
- b. Surat perjanjian sewa
- c. Bukti setoran kas
- d. Surat Keputusan (SK)
- e. Bukti potongan gaji

2. Penerimaan dari sewa aula

Bagian yang terlibat dalam penerimaan kas melalui sewa aula adalah:

- a. Kepala Dinas
- b. Bendahara penerimaan

- c. Penyewa
- d. Pengelola penerimaan

Dokumen-dokumen yang digunakan pada saat penerimaan kas yang dihasilkan dari sewa aula yaitu:

- a. Surat permohonan sewa aula
- b. Surat tagihan pembayaran
- c. Faktur atau kwitansi pembayaran

Dengan adanya penerimaan kas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembiayaan operasional dinas secara berkelanjutan. Penerimaan kas melalui Tenaga Kerja Asing dan sewa bangunan yang berupa sewa rumah Dinas dan sewa aula merupakan bagian dari upaya optimalisasi potensi pendapatan yang sah dengan bersumber dari pemanfaatan asset serta pelayanan tertentu yang diberikan oleh dinas kepada pihak eksternal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi dan Analisa yang telah dilakukan selama masa pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan evisiensi pada instansi tersebut. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan khusus terkait penggunaan aplikasi dan sistem digital, dikarenakan masih ditemukannya sejumlah pegawai yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penggunaan aplikasi atau sistem digital yang berkaitan dengan proses pencatatan dan pelaporan penerimaan kas. Oleh karena itu, dengan diadakannya pelatihan secara berkala diharapkan seluruh pegawai mampu memahami penggunaan aplikasi terutama terkait sistem penerimaan kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Dilakukan kegiatan mengenai sosialisasi prosedur penerimaan kas yang dilakukan secara merata. Dengan dilakukannya kegiatan ini diharapkan dapat membantu menciptakan keseragaman pemahaman dan meningkatkan ketaatan terhadap sistem pengendalian yang telah ditetapkan.

